

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Reni Berlian Silalahi¹, Halking²

^{1,2} Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: ¹reniberlian14@gmail.com ²halking123@unimed.ac.id

Abstrak

Rekrutmen politik adalah fungsi penting partai politik untuk keberlangsungan dan kelestarian partai. Efektivitas partai dalam memenangkan jabatan pemerintahan menunjukkan keberhasilan fungsi rekrutmen politik. Namun, di Indonesia, fungsi ini melemah seiring pertumbuhan partai, ditandai dengan fenomena kecurangan seperti naturalisasi (anggota pindah partai dengan ideologi berbeda), kader loncatan, kader karbitan, dan masalah transparansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi rekrutmen politik PDI Perjuangan di Kab. Tapanuli Utara menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan DPC PDI Perjuangan Kab. Tapanuli Utara menggunakan pola, prinsip, dan mekanisme berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan dan peraturan perundang-undangan dalam rekrutmen. Rekrutmen anggota dilakukan melalui persuasi dengan promosi, sosialisasi, dan kegiatan sosial. Rekrutmen pengurus internal dilakukan semi terbuka dengan calon ketua DPC ditetapkan oleh DPP melalui rekomendasi dari DPC berdasarkan keputusan konfercab PAC. Struktur pengurus internal ditentukan oleh ketua DPC terpilih, dengan peluang bagi non kader. Rekrutmen bakal calon legislatif dilakukan terbuka, memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara melalui tahap penyaringan, penjarangan, dan penetapan.

Kata Kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Abstract

Political recruitment is an essential function of political parties for their continuity and sustainability. The effectiveness of a party in winning government positions indicates the success of its political recruitment function. However, in Indonesia, this function has weakened alongside the growth of political parties, marked by phenomena such as naturalization (members switching parties with different ideologies), jump candidates, artificial candidates, and transparency issues. This study aims to analyze the implementation of the political recruitment function of PDI Perjuangan in North Tapanuli Regency using qualitative methods through interviews, observations, and documentation. The research findings show that the DPC PDI Perjuangan of North Tapanuli Regency employs patterns, principles, and mechanisms based on the AD/ART of PDI Perjuangan and legislation in recruitment. Member recruitment is conducted through persuasion via promotion, socialization, and social activities. Internal party leadership recruitment is semi-open, with the DPC chairman candidate determined by the DPP through recommendations from the DPC based on the PAC's conference decisions. The internal party structure is determined by the elected DPC chairman, with opportunities for non-cadres. Legislative candidate recruitment is conducted openly, providing equal opportunities for all citizens through filtering, screening, and selection stages.

Keywords: Political Party, Political Recruitment, PDI-Perjuangan.

PENDAHULUAN

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara demokratis. Sebuah negara yang demokratis, biasanya disana dihuni oleh banyak partai atau multi partai atau terdiri dari beberapa partai politik. (Muslih, 2021). Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, partisipasi dan kehadiran partai politik merupakan syarat penting bagi praktik demokrasi saat ini. Tanpa adanya partai politik maka sistem demokrasi tidak akan berjalan. Adanya partai politik menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud berkerjanya demokrasi. Partai politik bergerak untuk mendapatkan kekuasaan yang kemudian akan memimpin proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini menjadikan partai politik harus

mempersiapkan calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan. (Junaidi, 2020).

Secara umum, peran dan fungsi partai politik dapat dibagi menjadi dua. Pertama, peran eksternal dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini, partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pelatihan, kaderisasi, dan penerapan ideologi politik yang menjadi dasar pendirian partai tersebut. Kedua, partai politik juga memiliki tugas yang lebih eksternal, yang berkaitan dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk memperbaiki kondisi dan situasi masyarakat. (Efriza, 2019).

Partai politik memiliki berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, dan rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi partai politik yang paling penting. Partai politik memiliki peran penting dalam melakukan rekrutmen politik terhadap warga negara. Sesuai Pasal 29 (1), partai politik merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi: (a) anggota Partai Politik; (b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan (d) bakal calon Presiden dan wakil presiden. Ayat (1a) menjelaskan bahwa rekrutmen untuk posisi yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART, dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Dalam konteks ini, partai politik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan rekrutmen politik. Hal ini berarti bahwa partai politik berperan dalam mencari dan mengajak individu yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik, baik sebagai anggota partai maupun sebagai kader calon pemimpin yang akan diusung. Dengan demikian, partai politik berkontribusi dalam memperluas partisipasi politik di masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan politik mereka, tetapi juga bertanggung jawab dalam merekrut, melatih, dan mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pemimpin yang akhirnya akan memengaruhi pengambilan kebijakan dan arah negara. (Muhammad, 2018).

Rekrutmen politik merupakan suatu kunci dari keberhasilan sistem politik di dalam negara demokrasi, karena dalam fase ini membutuhkan suatu proses untuk menentukan orang-orang atau individu yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu baik melalui lembaga-lembaga yang ada (Sandi et al., 2023). Implementasi yang efektif dari fungsi rekrutmen oleh partai politik dapat menjadi kunci untuk menghasilkan pemimpin yang

kompeten dan memiliki komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 ayat 2, proses rekrutmen dalam partai politik harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekrutmen yang demokratis berarti berlandaskan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan suara mayoritas. Sementara itu, keterbukaan mengharuskan partai politik menerima semua golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dan mengikuti proses pembinaan dan kaderisasi yang ditetapkan oleh partai tersebut.

Proses rekrutmen politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari masa Orde Baru hingga Orde Reformasi, dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi. Pada masa Orde Baru, fungsi partai politik sering terhambat karena lebih berperan sebagai alat pemerintah daripada sebagai representasi aspirasi rakyat, yang mengakibatkan melemahnya fungsi partai politik termasuk dalam rekrutmen. Di era Reformasi, meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem rekrutmen politik, masih terdapat masalah serius seperti konflik internal dalam partai akibat prosedur rekrutmen yang tidak baik. Hal ini menyebabkan hasil akhir rekrutmen menjadi kurang optimal. (Siantuari, 2015).

Di panggung politik Indonesia, keberadaan partai politik telah mengalami pertumbuhan yang cepat baik dalam hal jumlah maupun ideologi yang diusung. Namun, keberadaan banyaknya partai politik ini sering hanya terlihat pada saat-saat penting seperti Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Pada periode menjelang event-event tersebut, partai politik terlihat sangat sibuk mencari figur yang akan diusung. Proses ini melibatkan lobi politik dan manuver politik yang intens. Kesibukan ini sering kali dipicu oleh lemahnya sistem rekrutmen dan kurangnya pola kaderisasi di dalam partai politik. Akibatnya, ketika mempersiapkan calon yang akan dipilih oleh masyarakat, partai politik sering kali tidak memiliki calon yang telah dipersiapkan melalui proses pengkaderan yang baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistematisasi dalam kriteria pemilihan calon, sehingga calon yang muncul sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti popularitas, pengaruh dari dinasti politik, dan unsur “mahar politik” (Tripantang & Suhaimi, n.d.)

Di tengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering kali menghadapi berbagai fenomena yang dianggap sebagai kecurangan. Contohnya adalah praktik naturalisasi, kader loncatan, kader karbitan, dan kader titipan. Selain itu, tantangan dan kendala dalam implementasi fungsi rekrutmen juga timbul, seperti kurangnya transparansi, dominasi elit partai, dan pengaruh uang dalam proses rekrutmen. Isu yang terus muncul

mengenai kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Hal ini terutama terlihat dalam fenomena "naturalisasi" kader partai politik yang sering beralih dari satu partai ke partai lain. Fenomena ini mencerminkan bahwa kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pola kaderisasi masih merupakan masalah yang cukup serius. Jika dianalisis lebih lanjut, dapat ditemukan hubungan erat antara lunturnya ideologi partai politik dengan permasalahan ini.

Jika setiap partai politik melaksanakan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi dengan baik, tidak akan menyaksikan fenomena "berkhianat" di mana kader partai politik pindah aliran. Idealnya, partai politik seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang mengasah dan membentuk kader-kader mereka, dan kemudian memanfaatkannya sebagai calon untuk jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Keterikatan emosional dan ideologis yang kuat antara partai politik dan para kader seharusnya dapat mencegah fenomena naturalisasi.

Faktanya, fenomena naturalisasi memperlihatkan partai politik di negara kita mengalami disfungsi dalam rekrutmen politik dan pola kaderisasi. Kegagalan ini menyebabkan partai politik tidak mampu menanamkan ideologi mereka kepada para kader, sehingga terjadi perpindahan kader dari satu partai ke partai lain. Hal ini merupakan indikator bahwa perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pola kaderisasi sangat penting untuk memperkuat kembali hubungan antara partai politik dan para kadernya serta mencegah hilangnya ideologi partai. Kemudian terjadinya manuver politik bukan hal baru lagi, ini menjadi permasalahan di pola rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. terjadinya hal ini memang bukan sepenuhnya salah dari partai politik sebagai rekrutmen politik, namun hal ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsinya rekrutmen politik pada tubuh partai.

Banyaknya permasalahan terkait fungsi rekrutmen politik menunjukkan bahwa hampir semua partai politik terjebak dalam lingkaran masalah ini, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan partai-partai yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat. Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sangat diperhatikan dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalankan fungsinya sebagai partai politik, terutama dalam melakukan rekrutmen politik.

Meskipun telah menjadi partai besar, PDI-P juga pernah mengalami fenomena kader loncatan, naturalisasi, dan manuver politik. Melemahnya atau disfungsi rekrutmen politik juga pernah terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan fenomena seperti perpindahan kader atau anggota partai ke partai lain, serta kader loncatan. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti implementasi rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan di tingkat Kabupaten

Tapanuli Utara. Penelitian ini akan mencakup rekrutmen anggota dan kader untuk menggantikan yang lama, rekrutmen pengurus DPC, serta rekrutmen calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Tapanuli Utara".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, metode analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara langsung dengan pengurus dan anggota PDI-Perjuangan, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen seperti AD/ART PDI Perjuangan, SK-SK PDI Perjuangan, serta arsip dan dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian berada di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara, yang beralamat di Jl. Balige, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi, yang berarti bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partai politik. Partai politik dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga posisinya berada di bawah pengawasan undang-undang dan harus mematuhi hukum yang berlaku. Setiap gerakan partai politik, termasuk kegiatan atau program partai serta pelaksanaan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, harus mengikuti ketentuan Undang-Undang. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, PDI Perjuangan dalam pembuatan peraturannya harus mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara mencakup rekrutmen anggota baru, rekrutmen pengurus partai, rekrutmen bakal calon legislatif, dan rekrutmen bakal calon kepala daerah serta wakil kepala daerah. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, rekrutmen politik untuk calon anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan pola rekrutmen terbuka sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan wakil bidang keanggotaan dan keorganisasian yang menyatakan bahwa pola rekrutmen terbuka dinilai lebih baik karena adil,

transparan, dan memungkinkan untuk menjangkau calon anggota berbakat tanpa dibatasi latar belakang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai.

Pernyataan di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syahid (2021) bahwa pola rekrutmen politik terbuka merupakan pola yang tepat dipakai dalam melakukan rekrutmen anggota politik, sama halnya pada partai PKS dalam merekrut anggota baru menggunakan pola rekrutmen terbuka karena dengan pola terbuka mampu memberikan kesan yang transparan, demokratis serta keterbukaan tentang adanya pelaksanaan calon anggota baru di kalangan masyarakat. (Syahid & Idris, 2021)

Pada implementasi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan dilakukan melalui cara atau pendekatan kampanye persuasif, sosialisasi langsung ataupun tidak langsung seperti melalui sosial media. Rekrutmen politik ini dilakukan oleh semua anggota yang ada di hierarki partai. Bentuk ajakan persuasif yang dilakukan oleh pihak PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan pada masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi seputar visi misi dan ideologi partai tidak hanya itu saja, alasan dan keuntungan apabila bergabung dengan partai PDI Perjuangan hingga masyarakat akan merasa terdorong dan termotivasi untuk bergabung dengan partainya. Pada cara rekrutmen anggota baru oleh PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara melalui sosialisasi langsung yang dilakukan melalui pertemuan dan kegiatan sosial untuk membangun hubungan personal dengan calon anggota. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan juga melalui website yang dapat diakses di internet untuk memperkenalkan PDI Perjuangan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Rekrutmen Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara

Rekrutmen pengurus internal partai politik merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas sebuah partai. Proses ini bertujuan untuk memilih individu-individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai dan tujuan partai. Rekrutmen dimulai dengan identifikasi kebutuhan, di mana partai menentukan posisi-posisi yang perlu diisi berdasarkan kebutuhan strategis dan operasional.

Pengurus internal partai merupakan salah satu komponen penting dalam mempertahankan berdirinya partai. Pengurus internal partai hendaknya berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituenya. Adanya paradigma yang memahami bahwa partai dan kegiatan berpartai dengan menjadi pengurus merupakan segalanya. Hal ini didukung dengan paradigma negatif yang ada mengenai status pengurus partai menjadi salah satu faktor penentu terpilih tidaknya seseorang menjadi wakil partai di kontestasi pemilihan umum. Jika status pengurus internal partai menjadi faktor terpilih atau tidaknya seseorang menjadi wakil Partai di pemilihan

umum maka setiap orang akan berlomba-lomba menjadi pengurus.(Hastuti, 2018)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Hastuti menekankan bahwa posisi untuk menjadi pengurus internal partai merupakan hal yang krusial, banyaknya stigma negatif mengenai posisi pengurus internal partai yang dengan mudah menjadi wakil partai dapat menimbulkan dampak buruk bagi citra partai, untuk itu diperlukan implementasi rekrutmen pengurus internal partai yang baik. Pada Implementasi fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam merekrut pengurus internal partai dilakukan secara semi tertutup, dimana Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten taput ditetapkan oleh DPP dari hasil usulan nama yang diberikan oleh DPC berdasarkan rekomendasi PAC. Pada penentuan struktural pengurus internal partai akan disusun oleh ketua DPC terpilih. Pada rekrutmen pengurus internal partai di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan dan keberlanjutan partai hal ini terlihat dari pengurus partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara berasal dari anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara yang pastinya sudah memahami kebutuhan partai dan untuk penentuan struktural pengurus internal partai

Proses rekrutmen dimulai dengan kaderisasi intensif yang bertujuan untuk membina anggota partai agar memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara melakukan seleksi ketat melalui berbagai tahap, baik formal maupun informal, untuk memastikan hanya individu terbaik yang terpilih. Mekanisme pergantian pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan setiap lima tahun sekali melalui mekanisme konferensi cabang (Konfercab). Pada Konfercab, calon ketua DPC diusulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat PAC. Ketua terpilih kemudian menyusun kepengurusan DPC dengan bantuan anggota formatur yang dipilih oleh utusan Konfercab, dan keputusan akhir penetapan pengurus internal partai akan ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Proses ini menekankan keterlibatan aktif kader di tingkat daerah karena mereka dianggap paling mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

DPC PDI Perjuangan juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen pengurus. Setiap calon pengurus harus melalui penilaian yang melibatkan berbagai aspek, seperti track record, loyalitas terhadap partai, dan kemampuan memimpin. Penilaian ini dilakukan oleh tim seleksi khusus yang terdiri dari para senior partai dan pakar terkait. Implementasi fungsi rekrutmen ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal partai, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengurus partai mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas politik dan sosial di masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan inklusif ini, PDIP berusaha membangun basis kepemimpinan yang kuat

dan berkelanjutan, yang dapat membawa partai mencapai tujuan-tujuannya di berbagai tingkat pemerintahan.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aulia Sylvany (2018) tentang pola rekrutmen anggota, pengurus, dan calon anggota legislatif Partai Perindo Kota Surabaya: Studi pluralisme dalam partai politik, proses rekrutmen politik untuk pengurus internal partai dilakukan secara terbuka-tertutup. Hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada pengurus harian Partai Perindo. Kepengurusan partai dilaksanakan melalui ajakan kerabat yang memiliki solidaritas tinggi dengan perekrut, kemudian diangkat menjadi pengurus partai. Jika seseorang memiliki hubungan dengan orang yang berkuasa, akan lebih mudah baginya untuk menduduki jabatan. Dikatakan terbuka karena beberapa jabatan dibuka untuk siapa saja yang memiliki keahlian yang sesuai, kualitas yang mumpuni, serta keinginan untuk menjadi pengurus partai. (Sylvany, n.d.).

Pola rekrutmen tertutup-terbuka dalam merekrut pengurus internal juga berlaku di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah ketua DPC terpilih oleh DPP selanjutnya untuk menentukan dan menetapkan struktur kepengurusan akan dilakukan oleh ketua DPC dengan merekrut kader partai yang memiliki kualitas dan komitmen tinggi untuk memajukan partai, namun juga disampaikan oleh pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjadi pengurus partai diberikan ruang untuk non kader yang memiliki kualitas dan kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan partai namun dengan ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati. Sistem ini menjadi salah satu alternatif yang baik untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam partai atau kekurangan anggota yang dapat menjadi pengurus. Kepengurusan partai politik di masa depan seharusnya diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional, yang terpisah dan dipisahkan dari para calon kontestan pemilihan umum. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk merancang ulang struktur internal partai politik guna menunjang profesionalisme wakil partai sebagai kontestan pemilu.

Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara

Rekrutmen politik calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara mencerminkan komitmen dan strategi partai dalam membangun kepemimpinan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Proses ini tidak hanya mengikuti prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi internal, transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Proses rekrutmen dimulai dengan tahap penjangkaran calon anggota legislatif, di mana calon dapat diajukan oleh kader partai yang terafiliasi dengan DPC PDI Perjuangan atau oleh masyarakat umum yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam AD/ART. Syarat-

syarat tersebut mencakup komitmen terhadap nilai-nilai dan ideologi partai, serta kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Selanjutnya, tahap penyaringan dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk berdasarkan AD/ART partai. Tim seleksi bertugas untuk memeriksa secara teliti rekam jejak, integritas, dan kemampuan calon anggota legislatif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang dipilih memiliki kompetensi yang diperlukan serta memiliki rekam jejak yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melewati tahap penyaringan, tahap penetapan calon anggota legislatif dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tahap terakhir adalah penetapan calon anggota legislatif. Keputusan penetapan calon didasarkan pada hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh tim seleksi. Pengurus partai turut terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Tapanuli Utara berperan signifikan dalam mempengaruhi partisipasi politik lokal. Dalam proses rekrutmennya, PDI Perjuangan menerapkan berbagai strategi untuk menarik kader-kader berkualitas yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam politik lokal. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang intensif, baik di tingkat akar rumput maupun di tingkat kepengurusan. Kader-kader potensial diidentifikasi melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti gotong royong, arisan, dan acara-acara keagamaan, di mana partai aktif berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan PDI Perjuangan untuk membangun hubungan personal yang kuat dengan calon kader, sehingga mereka merasa terlibat dan dihargai oleh partai.

Selain itu, PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya kaderisasi berjenjang, di mana calon kader diberikan pelatihan dan pendidikan politik secara bertahap sebelum mereka diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam partai. Program ini memastikan bahwa kader-kader yang direkrut memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi partai dan kebijakan politik yang diusung, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik lokal. Efektivitas strategi rekrutmen ini terlihat dari meningkatnya jumlah kader yang aktif dalam berbagai kegiatan politik lokal, seperti kampanye, pemilihan umum, dan kegiatan partai lainnya.

Dibandingkan dengan partai lain, seperti Golkar atau Gerindra, yang mungkin lebih mengandalkan pendekatan top-down dalam rekrutmen politik, PDI Perjuangan di Kabupaten Tapanuli Utara menonjol dengan pendekatan bottom-up yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Partai Golkar, misalnya, seringkali menggunakan pendekatan rekrutmen melalui jaringan elit dan tokoh masyarakat yang sudah mapan, sehingga terkadang kurang menyentuh

lapisan masyarakat bawah. Sementara itu, Gerindra cenderung fokus pada rekrutmen kader melalui pengaruh figur sentral dan tokoh nasional yang kuat, yang dapat menarik simpatisan berdasarkan popularitas tokoh tersebut.

Dengan pendekatan yang lebih komunitarian, PDI Perjuangan mampu membangun partisipasi politik lokal yang lebih luas dan mendalam. Partai ini berhasil menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa memiliki suara dan peran dalam proses politik, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Melalui rekrutmen yang efektif dan inklusif, PDI Perjuangan di Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya memperkuat basis kader partai tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi politik lokal secara keseluruhan, menciptakan dinamika politik yang lebih hidup dan partisipatif.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara, ditemukan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi kunci dalam menentukan kualitas kepemimpinan dan efektivitas partai. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara menerapkan pola rekrutmen terbuka untuk anggota partai, yang melibatkan identifikasi individu dengan potensi kepemimpinan dan komitmen terhadap ideologi partai, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi melalui ajakan langsung serta media seperti koran, media sosial, televisi, dan website. Untuk calon pengurus internal, diterapkan pola semi terbuka yang memberikan kesempatan bagi non-kader dengan persyaratan tertentu, sementara keputusan akhir dipegang oleh DPD PDI Perjuangan. Proses rekrutmen calon anggota legislatif juga terbuka, memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara melalui tahapan penjaringan, penyaringan, dan penetapan, dengan alokasi 70% untuk kader partai dan 30% untuk masyarakat umum, sesuai AD/ART PDI Perjuangan. Selain itu, PDI Perjuangan melakukan pembinaan kader untuk meningkatkan potensi SDM partai melalui lokakarya, kursus guru kader, seminar, dan diklat kader guna menyiapkan kader berkualitas untuk calon pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024.
- Azis, Abd, dkk. (2019). *Reaktualisasi Peran dan Fungsi Partai Politik*. Yogyakarta: PT Gramasurya.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

- Damsar.(2010). *Sosiologi Partai Politik*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah. (2008). *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Geraldly, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>.
- Handayani, Riri.(2020). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Cv. Absolute Media.
- Junaidi.(2020). Recruitment/Regeneration Function of Political Party In Indonesian Local Elections. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 442
- Labolo, Muhadam. Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Lili Romli. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal dan Demokrasi Lokal, Jakarta: *Jurnal Penelitian Politik* 15, No.2, hal 143-160.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Muslih, O. (2021). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif. In *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 06, Issue 01). <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
- Rush, Michael. Philip Althoff. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samosir, Osbin. (2022). *Partai Politik Pada Abad 2*. Jakarta: UKI Press Anggota APPTI
- Sandi, T., Areza, M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. In *Januari* (Vol. 2, Issue 1).
- Siantuari, K. A. (2015). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). *Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–22.
- Sugiono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Syahid, Imam. (2021). Implementasi Rekrutmen Anggota Partai PKS Di Kota Balikpapan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 9 Nomor 4.
- Tompodung, Monalisa C. Tumanduk, A. B. P. J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen P olitik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.

Tumanduk, monalisa dkk. (2022).Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EKSEKUTIF. Volume 2 No.1

Undang- undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai politik